PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SUGIARTI

1701120103

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: SUGIARTI
Nomor Pokok/NIRM	: 1701120103
Jurusan/ Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sumatera Selatan

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 14-10-2021 Pembimbing I: Rusmida Jun Hutabarat, SE.M.Si
NIDN : 0230066801

Tanggal 13-10-21 Pembimbing II: Ernawati, SE,MM.Ak.CA
NIDN :0203066201

137/PS/DFE/21

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr.Msy Mikial.SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Prodi Akuntansi

Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: SUGIARTI
Nomor Pokok/NIRM	: 1701120103
Jurusan/ Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sumatera Selatan

Penguji Skripsi :

Tanggal 14-10-2021 Ketua Penguji: Rusmida Jun Hutabarat, SE.M.Si
NIDN : 0230066801

Tanggal 13-10-2021 Penguji I : Ernawati, SE.MM.Ak.CA
NIDN :0203066201

Tanggal 21-10-2021 penguji II : Titi Suelmi, SE.MM.Ak.CA
NIDN : 0025075701

137/PS/DFE/21

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Prodi Akuntansi
Dr.Msy Mikial.SE.M.Si.Ak.CA.CSRS	Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN : 0205026401	NIDN : 0205056701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ***Hidup adalah rintangan yang harus di hadapi, perjuangan yang harus dimenangkan, rahasia yang harus di gali dan anugrah yang harus dipergunakan. Dengan ilmu menjadi muda, dengan seni hidup menjadi indah dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah.***
- ***Jika mereka katakan tidak mungkin ingatlah itu tidak mungkin untuk mereka bukan untuk kamu.***

Kupersemahkan kepada :

- Allah Swt
- Kedua orang tuaku
- Para pendidikku yang terhormat
- Teman – teman seperjuangan
- Almamater tercinta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SUGIARTI
Nomor Pokok	: 17.01.12.0103
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menjiplak karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Juni 2021

SUGIARTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul**"PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN DAN PAJAK BUMI BANGUNAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN''.** Skripsi ini merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai gelar sarjana ekonomi program studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang. Saya menyadari dalam penyusunan dan penulisan proposal ini masih banyak kekurangan tetapi saya tetap berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Ir.Hj.Nyimas Manisah, M.P.selaku rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr.Msy.Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
3. Ibu Dr. M. Ima Andriyani,SE.M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
4. Ibu Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA. selaku Ka Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
5. Ibu Rusmida Jun Hutabarat, SE,M.Si Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memotivasi penulis sehingga Skripsi dapat diselesaikan.
6. Ibu Ernawati,SE.MM.Ak.CA selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan berusaha keras memberi bimbingan serta mengarahkan guna penyelesaian Skripsi.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini
8. Ibu dan Bapak saya, saudara-saudara saya, yang tiada henti memberikan Doa dan support agar bias menyelesaikan Skripsi ini
9. Teman perjuangan saya Rahmat Hidayat, Erlika Putri Ayu dan Inkan Putri yang menyemangati saya dan teman teman seangkatan saya terima kasih.

Sebagai penutup semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Palembang, Juni 2021

Sugiarti

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR…….……... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN……..….1

1.1.Latar Belakang Penelitian 1

1.2.Perumusan Masalah 6

1.3.Tujuan Penelitian 6

1.4.Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUN PUSTAKA 8

2.1. Kajian Teoritis.....8

2.1.1. Pajak.....8

2.1.2. Pengelompokan Pajak 9

2.1.3. Cara penghitungan Pajak.....10

2.1.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....11

2.1.2.1. Subyek dan Obyek PBB.....12

2.1.2.2.PerhitunganBPHTB……13

2.1.2.3. Saat Terhutang BPHTB.....13

2.2. Pajak Bumi Bangunan.....14

2.2.1. Dasar Hukum PBB.....16

2.2.2. Subyek dan Obyek PBB.....18

2.2.3. Dasar Pemungutan PBB.....20

2.2.4. Sistem Pemungutan PBB 20

2.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek PBB 22

2.2.6. Pemahaman Wajib Pajak.....24

2.3. Pendapatan Asli Daerah 25

2.3.1. Ciri-ciri Retribusi Daerah.....27

2.4. Penelitian Lain Yang Relevan.....29

2.5. Kerangka Berfikir.....31

2.6. Hipotesis Penelitian.....32

BAB III METODE PENELITIAN 33

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 33

3.1.1. Tempat Penelitian.....33
3.1.2. Waktu Penelitian 33

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....33

3.2.1. Sumber Data.....33
3.2.2. Jenis Data 34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 35

3.3. Populasi Sample dan Teknik Sampling 37

3.3.1. Populasi.....37

3.3.2. Sampel.....38

3.3.3. Teknik Sampling 39

3.4. Rancangan Peneliian 40

3.5. Variabel dan Definisi Operasional…….....40

3.6. Instrumen Penelitian.....42

3.7. Teknik Analisis 42

3.7.1. Statistik Deskriftif 42

3.7.2. Uji Normalitas.....43

3.7.3. Uji Asumsi Klasik.....43

3.7.3.1. Uji Multikolinieritas.....43

3.7.3.2. Uji Autokorelasi 44

3.7.3.3 Uji Heterokidasitas.....45
3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda.....45
3.7.5. Uji Hipotesis 46
3.7.6. Uji F 47
3.7.7. Uji T 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……49

4.1. Hasil Penelitian……...49

4.1.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palemban…….49

4.1.2. Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang……51

4.2. Pembahasan ……55

4.3. Analisis Pembahasan ……56

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif…….56

4.3.2. Uji Normalitas …….56

4.3.3. Uji Asumsi Klasik……58

4.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda……61

4.3.5. Uji Hipotesis Statistik……..63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……...66

5.1. Kesimpulan…….66

5.2. Saran……67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....31

Tabel 3.3 Penentuan Sampel Penelitian.....41

Tabel 3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....44

Tabel 3.7 Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi.....48

Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian…….…....58

Tabel 4.2 Deskriptif Variabel BPHTB,PBB dan PAD……..59

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas…… 61

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas……62

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi……...……63

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastitas……64

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda……65

Tabel 4.8 Hasil Uji F ……66

Tabel 4.9 Hasil Uji t……67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir……..…33

Gambar 3.1 Macam-Macam Teknik Sampling……..……31

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Histogram…….……60

ABSTRAK

Sugiarti, Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan. (Dibawah bimbingan Rusmida Jun Hutabarat Pembimbing I dan Ernawati Pembimbing II)

Skripsi ini pada dasarnya meneliti tentang Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan adanya 1). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan. 2). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial. 3). pengaruh Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial. Pertimbangan yang diambil adalah Kecamatan yang ada dikota Palembang yang berjumlah 14 Kecamatan sebagai responden. Variabel yang digunakan yaitu Lingkungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai variabel independen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Model yang di gunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan hasil persamaan $Y = 1366,854 + 1,958\ X_1 + 0,963\ X_2 + e$. Dimana Y merupakan Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), konstanta sebesar 1366,854 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X_1) sebesar 1,958, Pajak Bumi Bangunan (PBB) (X_2) sebesar 0,963.. Hasil dari uji F dengan F_{hitung} sebesar 457.473 dengan tingkat Sig. 0,000 karena nilai Sig F $\leq$ 0,05 maka ada pengaruh secara simultan. Hasil uji t Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X_1) dengan hasil nilai signifikan uji t $\leq$ 0,05 yaitu (0.000 $\leq$ 0,05) maka ada pengaruh secara parsial dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) (X_2) dengan hasil nilai signifikan uji t $\leq$ 0,05 yaitu (0,000 $\leq$ 0,05) maka ada pengaruh secara parsial maka ada pengaruh secara parsial. Dari kesimpulan peneliti menyatakan bahwa Secara simultan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan, Secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X_1) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Secara parsial Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Palembang Sumatera Selatan (X_2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Sugiarti The Effect of Customs on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) and Land Building Tax (PBB) on Regional Original Income (PAD) of Palembang City, South Sumatra. (Under the guidance of Rusmida Jun Hutabarat Advisor I and Ernawati Advisor II)

This thesis basically examines the effect of the Customs on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) and Land Building Tax (PBB) on Regional Original Income (PAD) in Palembang, South Sumatra. The purpose of this research is to find out, analyze and prove the existence of 1). Effect of Customs on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) and Land Building Tax (PBB) on Regional Original Income (PAD) simultaneously. 2). Partial effect of Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) on Regional Original Income (PAD). 3). the effect of the Building Land Tax (PBB) on Regional Original Income (PAD) partially. The considerations taken are the districts in the city of Palembang, which amount to 14 districts as respondents. The variables used are the Environmental Duties for Land and Building Rights Acquisition (BPHTB) and Land Building Tax (PBB) as independent variables, and Local Revenue (PAD) as the dependent variable. The model used is Multiple Linear Regression with the equation Y = 1366.854 + 1.958 X1 + 0.963 X2 + e. Where Y is the Local Original Income Variable (PAD), a constant of 1366.854 and the Acquisition Fee for Land and Building Rights (BPHTB) (X1) of 1.958, Land Building Tax (PBB) (X2) of 0.963.. The results of the F test with Fcount of 457,473 with a level of Sig. 0.000 because the value of Sig F 0.05 then there is a simultaneous effect. The results of the t-test of Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) (X1) with the results of a significant value of t-test 0.05, namely (0.000 0.05), then there is a partial effect and the Building Land Tax (PBB) (X2) with the results of the significant value of the t test 0.05, namely (0.000 0.05), then there is a partial effect, then there is a partial effect. From the conclusion, the researcher states that the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) and Land Building Tax (PBB) have an effect on the Palembang City's Original Regional Revenue (PAD), Partially, the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) (X1) has an effect on Regional Original Income (PAD) and partially Land Building Tax (PBB) for the City of Palembang, South Sumatra (X2), has an effect on Regional Original Income (PAD) for the City of Palembang, South Sumatra.

Keywords: Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), Land Building Tax (PBB), Local Revenue (PAD)

RIWAYAT HIDUP

Sugiarti, dilahirkan di Talang Jawa pada tanggal 25 Maret 1999 dari Ayah Ropai dan Ibu Julia, ia anak Keempat dari 5 Bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 41 Tebing Tinggi, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2013 di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi dan selanjutnya menyelesaikan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi jurusan IPS pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ia memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan suatu negara, hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan suatu negara untuk suatu pencapaian kesejahteraan. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Banyak negara, termasuk Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara utama.

Pada era reformasi ini Negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulunya terpusat beralih ke sistem pemungutan pajak daerah dan pemerintah pusat hanya menerima beberapa proses dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah. Adanya pelaksanaan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap sektor keuangan pusat terhadap daerah mengakibatkan adanya sumber-sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pusat telah beralih kepada kepala daerah kabupaten/kota.

Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap

kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1985.

Sedangkan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1985. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Selain itu pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yaitu *budgeter* (memasukkan) dan *non budgeter* (mengatur). *Budgeter* atau yang berarti memasukkan adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak. Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat *budgeter* juga sangat berkaitan dengan fungsi sosial dalam batas-batas keadilan dan perikemanusian yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila. Sifat pajak yang lain

adalah *non budgeter* yang berarti mengatur. Dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan. Semakin besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang lebih dan pembangunan pun akan terus berjalan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transfaran, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisassi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan. (Azis,2011). Menurut (Todaro, 2012:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang kehidupan masyarakat. Menurut Kuncoro (2011 : 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini

dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota, diIndonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah pusat ini tentu akan berdampak positif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah tidaklah mudah, dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang mencukupi dan dana tersebut akan meningkat dari tahun ketahun. Maka dari itu, pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dimana salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber anggaranya dihimpun dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Provinsi Sumatera Selatan yang strategis merupakan salah satu kawasan industry, kawasan wisata dan hiburan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat domestik maupun asing, hal tersebut berdampak pada semakin besar

jumlah penduduk usia produktif yang tertarik dan datang untuk mencari pekerjaan di bidang industry di Sumatera Selatan, begitu juga dengan para wisatawan domestik yang intensitas lalu lalangnya cukup sering berkunjung ke Sumatera Selatan karena memanfaatkan posisi strategis salah satu Kota di Sumatera Selatan yaitu Palembang.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, tentu akan berpengaruh pada jumlah pendapatan suatu wilayah melalui pemungutun yang disebut dengan pajak. Hal ini tentu akan berdampak pada pertambahan jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang penduduk yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Palembang, dari setiap individu atau badan akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak pada dasarnya dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, namun realisasi dan penerimaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Semakin besar penghasilan yang dicapai para pekerja yang ada di Kota Palembang tentu akan mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka. Tingginya minat pendatang untuk menetap lebih lama mendorong mereka ingin memiliki asset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain tanah dan bangunan memang mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat, tanah pun bisa dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki asset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi. Akibat dari kejadian Transaksi BPHTB

tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan**

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam Penelitian-Penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang Sumatera Selatan.

1. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan
2. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam Penelitian-Penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang Sumatera Selatan

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kota Palembang sebagai bahan masukan yang diteliti dalam kaitanya dengan fungsi Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya, dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sama dengan bahasan yang lebih mendalam.

c. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan berfikir mengenai Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. Dkk. 2020.***Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus.***Edisi ke Tiga. Jakarta: Salemba Empat

Azis, 2011.***Dana Perimbangan Pemerintah.*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Badric, 2017. ***Pendapatan Asli Daerah*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Carunia. 2017. ***Pendapatan Asli Daerah*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Ghozali, Imam. 2013. ***Statistik***. Jakarta: Erlangga

Jogiyanto, 2010. Variabel dan Definisi Operasional

Kuncoro.2011.***Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah***.Jakarta : Salemba Empat

Moleong, 2017.***Teknik Pengumpulan Data***

Mardiasmo. 2011.***Perpajakan***. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Ridwan

Marihot Pahala Siahaan. 2009. ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers. 2010

Muliari.Dkk. 2010. ***Rumus Solvin*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Nazir. 2011**.** ***Wawancara*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Priantar, 2012.***Pengelompokkan Pajak*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Resmi, S. (2014).***Perpajakan Teori dan Kasus***.Jakarta: Salemba Empat

Sanusi. 2013. ***Skala Pengukuran Variabel***. (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Sofyan. 2014. ***Populasi*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Sugiyono. 2013. ***Metode Penelitian Bisnis***. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015***. Teknik Sampling.*** Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2016. **Definisi Operasional Variabel**. Bandung : CV. Alfabeta

Sugiyono.2018. ***Analisis Regresi Linear Berganda***.Bandung : Alfabeta

Todaro. 2012. ***Pertumbuhan Penduduk*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Unanti Press.2021. ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir***. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Tarif Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Perimbangan Keuangan

Wasis. 2018. ***Sampel*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Widyaningsih. 2011. ***Perpajakan*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]

Yasdianto. 2014.***Cara Perhitungan Pemungutan Pajak*** (Diakses tanggal 11 Juni 2021) [www.google.com]